

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan pusat adalah pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Hubungan dalam fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi. Dalam sistem otonomi ini dikenal dengan adanya desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan. Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan gubernur, bupati/walikota ialah pemegang kekuasaan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimangsut dalam UUD 1945. Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik

yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih (*clean government*). Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi entitas (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan pada publik (Putri dkk, 2017). Pemerintah daerah harus memperhatikan dengan baik dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi semua pihak. Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang di publikasikan guna kepentingan yang berbeda-beda setiap pihak ataupun individu, sehingga pemerintah di harapkan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Armel dkk, 2017).

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah daerah memerlukan program aplikasi yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan daerah. Program yang dimaksud adalah program aplikasi komputer yang disebut dengan SIMDA atau sistem informasi manajemen daerah. Aplikasi SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih kompherensif, yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah (Runtuwene dkk, 2017). Dengan adanya

SIMDA dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, dan dapat diuji kebenarannya.

Selain itu, tidak hanya SIMDA saja yang yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tetapi juga sumber daya manusia. Karena dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkan (Lisda, dkk 2018). Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan dan karya (rasio, rasa dan karsa). Sumber daya manusia berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam laporan keuangan tersebut terdapat komponen laporan keuangan diantaranya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan-laporan tersebut kemudian di periksa oleh auditor. Auditor internal tidak hanya memeriksa kegiatan akuntansi dan keuangan, tetapi juga jenis program lainya dalam entitas. Sebagaimana didefinisikan dalam *Statements of Responsibilities of Internal Auditor* yang diterbitkan oleh IIA,

“tujuan internal audit adalah untuk membantu anggota organisasi melakukan tanggung jawab secara efektif”. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan analisis penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah. Staf audit diharapkan mempunyai komitmen terhadap organisasi agar informasi yang diberikan dapat di percaya.

Komitmen organisasi adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Komitmen organisasi merupakan nilai personal yang kadang-kadang mengacu pada sikap loyal pada organisasi atau komitmen pada perusahaan itu (Rivaldi, dkk 2018). Dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah terdapat komponen opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan keuangan di katakan baik dan berkualitas apabila mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada pemerintah Kabupaten Rembang gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2016 yang dirilis tahun 2017. Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pemerintah Kabupaten Rembang. Salah

satu alasan masih di terimanya opini wajar dengan pengecualian bagi Kabupaten Rembang adalah soal aset. Nilai aset yang belum diyakini BPK senilai Rp 350 miliar. Sebenarnya nilai tersebut turun drastis dibandingkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 2016, aset yang belum diyakini sekitar Rp 1,5 Triliyun. Penurunan angka tersebut berkat kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Patokan angka materialitas untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu sebesar Rp 25 miliar.

Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rembang yang masih menjadi sorotan BPK yang terdiri dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (DPUPR) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Untuk di Dinkes persoalan aset sudah hampir selesai, sedangkan yang masih banyak ada di Disdikpora dan DPUPR. Penelusuran aset di beberapa OPD sebenarnya sudah dilaksanakan tahun lalu, itu berdasarkan rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016. Sedangkan untuk laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2017, ada beberapa rekomendasi dari BPK diantaranya pemerintah Kabupaten Rembang diminta segera menindak lanjuti hasil penelusuran aset. Kemudian mencocokkan antara bidang aset, akuntansi dan hasil penelusuran aset oleh Inspektorat ([www. radarjogja.com](http://www.radarjogja.com)).

Penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian ini termotivasi dari penelitian

yang dilakukan oleh Abidin, dkk (2018) dalam penelitiannya mengukur mengenai pengaruh implementasi sistem manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Armel, dkk (2017) dalam penelitiannya mengukur mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Suherman, dkk (2017) meneliti pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini telah dikembangkan oleh Putri, dkk (2018) meneliti pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Lisda, dkk (2017) dan Runtuwene, dkk (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Terdapat hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian Putri, dkk (2018), Putra (2017) dan Armel (2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Manimpurung, dkk (2018) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian dari Armel (2017) bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penelitian dari

Kesuma, dkk (2017) bahwa penerapan standar akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dari Suherman dan Susanti (2017) menyatakan bahwa internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut Pramita (2017) dan Suhaeli (2017) bahwa internal audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Mutiana, dkk (2017) dan Kalangi, dkk (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Abidin, dkk (2018) adalah yang pertama penelitian Abidin, dkk (2018) hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi, sedangkan di penelitian ini terdapat penambahan dua variabel independen. Kedua variabel ini antara lain internal audit dan komitmen organisasi. Alasan penambahan variabel ini diantaranya: (1) internal audit mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan, dengan adanya kerjasama yang baik antara auditor internal dan auditor eksternal maka akan menciptakan posisi pengawasan yang kuat untuk mencegah adanya penyimpangan laporan keuangan. (2) komitmen organisasi sangat penting karena dengan suatu komitmen maka seorang pegawai dapat menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan studi empirisnya. Penelitian Abidin, dkk (2018) studi empiris yang digunakan yaitu di Kota Malang, sedangkan penelitian ini studi empirisnya di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, Internal Audit dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Begitu luasnya pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi, internal audit dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu untuk menghindari kesalahan pandangan karena luasnya permasalahan ini maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah berikut ini:

- a) Variabel independen: implementasi sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi, internal audit dan komitmen organisasi.
- b) Variabel dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- c) Objek penelitian: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rembang.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul diantaranya :

1. Apakah implementasi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai peneliti dari latar belakang di atas diantaranya:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh implementasi sistem manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan perbandingan bagi riset-riset selanjutnya terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi ataupun referensi dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui Implementasi Sistem Manajemen (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi, internal audit dan komitmen organisasi sehingga tujuan pemerintahan tercapai.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan dapat menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi, internal audit dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

